



**KEPAHIANG**

**SENIN , 24 JULI 2023**

**SUMBER BERITA**

|                                     |                   |                 |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | RAKYAT BENGKULU   | MEDIA INDONESIA |
|                                     | BENGKULU EKSPRESS | KOMPAS          |
|                                     | RADAR BENGKULU    | .....           |

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**OPD Siap-Siap Ditagih Jaksa**

**TGR Baru Dibayar 65 Persen**

**KEPAHIANG** - Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Kepahiang, Dr. Hartono, M.Pd meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyelesaikan tuntutan ganti rugi (TGR). Atas temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Bengkulu, tahun anggaran 2022. Saat ini TGR baru dibayar oleh sejumlah OPD 65 persen dari total temuan Rp 2,7 miliar.

"Pengembalian temuan dari BPK ini sifatnya wajib, maka harus segera diselesaikan. Untuk kita minta OPD yang belum mencicil TGR, disegerakan," ujar Sekda, kemarin.

Secara aturan, batas akhir penyelesaian TGR pada 12 Juli lalu. namun hingga saat ini TGR Rp 2,7 miliar ini belum juga diselesaikan.

Inspektorat Kabupaten Kepahiang, akan menyampaikan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejari Kepahiang.

"Sekarang dalam Proses (SKK TGR hasil Audit BPK RI, red)," kata Kajari Kepahiang, Ika Mauluddhina, MH, kemarin.

Ika Menjelaskan, SKK ini masih dalam proses pengajuan oleh pihak Inspektorat. Sebelum di SKK kan, pihaknya minta kepada Inspektorat untuk kembali menelaah TGR yang dilakukan.

"Kita telaah dulu, apakah ini masih diselesaikan atau akan dikembalikan ke Inspektorat," singkatnya.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Kepahiang, Hendri, SH menjelaskan, pengembalian TGR ini terus dilakukan. Namun pengembalian ini dilakukan dengan cicil, sehingga progres pengembalian TGR ini terlihat lambat.

"Sekarang terhitung baru di angka 65 persen pengembalian TGR yang sudah dilakukan," kata Hendri.

Hendri menyampaikan, ada beberapa OPD yang sulit untuk dilakukan penagihan. Namun, Hendri tidak bisa menyebutkan OPD yang sulit ditagih ini.

"Untuk yang sulit dilakukan penagihan ini, memang akan kita SKK kan ke Kejari," tutupnya.

Untuk diketahui, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kepahiang tahun 2022, terdapat 24 point temuan BPK RI.

Dengan rincian, perjalanan dinas Rp 1.421.724.742, pembayaran belanja honorarium Rp 699.979.800 yang tidak sesuai aturan dan potensi kesalahan pembayaran belanja honorarium Rp 293.141.625.

Kemudian, honorarium tim pelaksana kegiatan tidak sesuai ketentuan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp 56.805.000, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Rp 2.586.000, Kesbangpol Rp 62.700.000, RSUD Rp 4.905.750, Satpol PP Rp 8.602.500 dan Sekretariat Daerah (Setda) Rp 20.339.000.

Selanjutnya, honorarium penanggung jawab pengelola keuangan tidak sesuai ketentuan di Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, pemuda dan olahraga, Dinas Perindustrian dan ketenagakerjaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian dengan total keseluruhan sebesar, Rp 89.479.000.

Serta terdapat Honorarium tim pelaksana kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan senilai Rp 30.045.000.

Kelebihan Pembayaran atas Honorarium tim pelaksana kegiatan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM sebesar Rp 14.130.000, atau melebihi pagu anggaran SSH. (eng)